

**Konflik Muslim Moro Dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 – 1996
(Suatu Kajian Historis)**

Disusun Oleh:
Riswanto
Drs. Ridwan Melay, M.Hum
Drs. Tugiman, M.S

Pendidikan Sejarah, FKIP-Universitas Riau
Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru
Email: reiswanto@gmail.com

ABSTRACT

Moro conflict motivated by various forms of government policies that are not favorable for the Philippine Moro communities. Christian Catholic population resettlement programs Muslim to region inter-ethnic conflict. Moro conflict exacerbated by various forms of discrimination, marginalization the Moro society such as poverty, low education levels and the difficulty of obtaining employment. Moro conflict experienced the most crucial period in the time of President Ferdinand Marcos in 1968, the incident Jabidah that killed at least 180 Muslims.

This study aims 1) to describe the factors and the background of the Muslim Moro conflict with the Philippine government, 2) to reveal how the emergence of Muslim movements Moro; 3) to know the Philippine government's efforts to resolve conflicts Moro.

The method used is the Historical Method. The goal is to reconstruct, examine, evaluate, and explain the evidence to get the facts and achieve results that can accounted.

The results showed that the Muslim Moro conflict has lasted long enough, since the presence of the Spaniards to the U.S. occupation of the Philippines. Various forms of discrimination and marginalization experienced by Muslim communities continue until the independence of the Philippines in 1946. As a result, emerging movements Moro society organizations are demanding independence. The Moro movement such as: MIM, MNLF and MILF. Government's response to the Moro liberation movement is to a military strike, but the insistence of the OIC held talks. Negotiations between the Philippine Government and the Moro Muslims is quite successful Peace Agreement in 1996, resulting in the formation of 13 areas of special autonomy for the Muslim community.

Keyword: *Conflict, Muslims, Moro, Philippines*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan berkonflik. Diantaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya. Dan keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan oleh masyarakat yang merasa dirinya dirugikan.

Pasca berakhirnya Perang Dingin menimbulkan perubahan politik Dunia, perang antar Bangsa mulai berkurang namun perang antar saudara semakin meningkat. Terutama banyak terjadi di negara berkembang yang banyak terdapat kelompok etnis. Konflik jenis baru ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok etnis dalam negara akibat perbedaan yang dimiliki dari masing-masing kelompok dalam negara bersangkutan, baik perbedaan identitas etnik, budaya, dan agama maupun kesenjangan sosial-ekonomi.

Konflik etnis merupakan salah satu bentuk konflik lokal yang telah terpolarisasi menjadi isu internasional serta menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Konflik etnis inilah yang pada akhirnya berubah menjadi gerakan pemberontakan atau separatis yang melanda banyak negara di dunia. Gerakan separatis ini dilakukan dengan berbagai tujuan, misalnya menuntut otonomi secara khusus, pemisahan wilayah atau membentuk negara sendiri. Ada beberapa contoh gerakan separatis di berbagai negara antara lain: Gerakan separatis Quebec di Kanada, Gerakan separatis Tamil Elam (Macan Tamil) di Srilangka, Gerakan Bouganville Revoy Army di Papua New Guinea, Irish Republican Army (IRA) di Irlandia Utara, The Pattani United Liberation Organisation (PULO) di Thailand, Gerakan Moro National Liberation Front (MNLF), Gerakan Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Filipina dan masih banyak sederetan contoh gerakan separatis yang telah berubah wujud menjadi persoalan internasional.

Konflik di Filipina Selatan merupakan konflik yang sangat tua dan klasik, berawal dari penolakan penduduk Mindanao terhadap upaya penjajahan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-15 Masehi. Selama masa penjajahan, Spanyol menerapkan politik *divide and rule* (pecah belah dan kuasai) dan *mission secret* (misi suci) penyebaran agama Kristen terhadap orang-orang Islam yang berada di wilayah Mindanao dan Sulu.

Spanyol dalam menjajah Filipina dengan sengaja menciptakan *image* yang buruk terhadap orang Muslim Filipina yang berada di Selatan. Spanyol menyebut orang Muslim itu dengan sebutan *Moor* (Moro), sebuah kata yang bermuatan unsur politis. Menurut **Helmiati (2009 : 219)** kata Moor berasal dari bahasa Spanyol, Moor berarti buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan *juramentados* (tukang bunuh).

Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan. Muslim Moro atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bangsa Moro adalah komunitas Muslim yang menempati kepulauan Mindanao-Sulu beserta gugusannya di Filipina Selatan.

Kawasan Filipina ditemukan pada tahun 1521 oleh seorang berkebangsaan Portugis bernama Ferdinand Magellan. Namun baru tahun 1564 Filipina resmi dijadikan jajahan Spanyol. Spanyol menjajah Filipina selama kurun waktu lebih dari 3 abad (1564-1898). Selama penjajahan itu bangsa Spanyol telah berhasil mengkristen penduduk Filipina, kecuali penduduk Muslim Moro di wilayah Selatan yang beragama Islam.

Selama masa penjajahannya di Filipina, Spanyol tidak dapat menguasai secara penuh wilayah Moro sebab orang-orang Muslim melakukan perlawanan secara gigih terhadap Spanyol yang ingin menjajah dan menyebarkan agama Kristen Katholik di wilayah itu. Upaya menaklukkan wilayah Moro terus dilakukan oleh Spanyol sampai terjadinya perang Spanyol – Amerika Serikat tahun 1898, perang ini diakibatkan campur tangan Amerika Serikat atas isu politik terhadap negara jajahan Spanyol di Karibia dan Pasifik Selatan.

Kemenangan Amerika Serikat itu berarti berhasil memperoleh daerah jajahan baru. Menurut **Erni Budiwanti (2003 : 81)** melalui *Treaty of Paris* tahun 1898, Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat termasuk wilayah Moro, Spanyol mengklaim wilayah Moro termasuk sebagai daerah jajahannya. Spanyol menjualnya kepada Amerika Serikat seharga 20 juta dolar Mexico.

Gagasan perjuangan masyarakat Moro untuk menuntut kebebasan dan kemerdekaan di Filipina telah berlangsung cukup lama, sejak zaman kesultanan-kesultanan di wilayah Filipina Selatan, baik ketika melawan penjajahan Spanyol ataupun penjajahan Amerika Serikat serta perjuangan gerilya melawan pemerintah pusat Filipina. Baru pada tahun 1968 dibentuk gerakan atau organisasi yang menyatukan kelompok Muslim dalam gerakan *Mindanao Independent Movement* (Gerakan Kemerdekaan Mindanao) yang didirikan dengan tujuan perjuangan menuntut kemerdekaan masyarakat Muslim Mindanao dari negara Filipina, yang dipimpin oleh Udtog Matalam. (**Kustigar Nadeak & Atmadji, 1986 : 170**). Namun, dalam perkembangannya MIM melebur ke dalam gerakan perjuangan pembebasan Moro, yaitu MNLF (*Moro National Liberation Front*) terbentuk pada pertengahan tahun 1971 yang diprakarsai oleh Nur Misuari, sebagai akibat dari tragedi Jabidah di Pulau Corregidor pada 18 Maret 1968 yang merenggut nyawa 180 orang Muslim.

Nur Misuari menganggap bahwa konflik Moro sebagai konflik yang bersifat rasial karena telah terjadi politik *genosida* terhadap komunitas Muslim. Konflik di Filipina Selatan telah menempatkan etnis Muslim menjadi korban utama dari kebijakan pemerintah Filipina, sehingga Nur Misuari mengajak kepada komunitas Islam untuk memperhatikan masalah ini secara serius. Nur Misuari juga meminta kepada seluruh *datu* di Mindanao untuk bersatu padu guna mendesak pemerintah Filipina untuk menghentikan *genosida*, diskriminasi, marginalisasi masyarakat Muslim di Filipina Selatan dengan mengeluarkan Manifesto Moro yang kemudian menjadi embrio lahirnya organisasi pembebasan Moro (Moro Nation Liberation Front).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian historis atau metode sejarah. Metode penelitian sejarah artinya jalan, cara, atau petunjuk teknis dalam melakukan proses penelitian. Metode sejarah, seperti yang dinyatakan oleh **Nugroho Notosusanto (1984 : 10 – 11)** bahwa metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari pada hasil-hasilnya biasanya dalam bentuk tulisan. Pernyataan Nugroho Notosusanto senada dengan yang diungkapkan oleh **Luis Gottschalk (1986 : 32)** bahwa metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang diperoleh, serta disebut historiografi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Bentuk data sekunder pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, surat kabar dan media lainnya.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah metode sejarah seperti yang dijelaskan oleh **Louis Gottscalk (1986 : 83)** dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemilihan subjek yang akan diteliti.
- b. Mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian.
- c. Penentuan unsur yang dapat dipercaya dari sumber-sumber yang terbukti sejati.

Penulis akan menjelaskan permasalahan berdasarkan data teoritis yang diperoleh. Angka-angka statistik hanya digunakan sebagai data pendukung dari data teoritis yang dipaparkan.

HASIL PENELITIAN

Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya kepulauan Sulu dan Mindanao tidak terlepas dari letak geografis Filipina yang strategis di sepanjang rute perdagangan dunia telah menarik Filipina secara perlahan masuk ke dalam rute perdagangan maritim internasional yang membentang dari Laut Merah hingga Laut Cina Selatan. Sejak abad IX hingga abad XVI Masehi, rute perdagangan ini dikuasai oleh para pedagang muslim. Sejak abad X para pedagang muslim singgah di Kalimantan (Borneo) dan memasuki abad XIII mereka mulai singgah di Sulu. Sejak saat itu para pedagang muslim sering singgah di kepulauan Filipina Selatan dan menyebarkan agama Islam sebelum melanjutkan perjalanan ke Utara menuju Cina. (**Caesar Adib Majul, 1988 : 8**). Mengenai tahun pasti kapan agama Islam masuk ke wilayah Filipina beberapa sejarawan berbeda pendapat mengenai hal itu, **Abu**

Ibrahim Muhammad Daud (2008 : 66) dan **John Gershman (dalam Moeflich Hasbullah, 2003 : 238)** bahwa Islam masuk ke wilayah Filipina pada tahun 1210 M, berbeda dengan pandangan John Gershman, menurut **Salah Jubair (dalam Heru Susetyo, 2008 : 6)** sejarah keislaman orang Moro ada sejak tahun 1310 M dengan ditemukan bukti arkeologi berupa nisan yang merupakan seorang pemimpin Islam generasi awal di Mindanao.

Menurut catatan sejarah, seperti yang tertulis dalam *tarsila* (Arab: Silsilah) Kesultanan Sulu, masuknya Islam ke Filipina bermula pada masa Rapa Sipad (bahasa sanskerta: *Raja Shripaduka*) memerintah di Pulau Jolo, ketika itu datanglah seorang Muslim bernama Tuan Masha'ika, ke suatu tempat yang disebut *Maimbung* (bahagian Selatan Pulau Sulu). Pada waktu itu masyarakat Pulau Jolo masih menyembah berhala dan animisme. Karena beberapa kelebihan Tuan Masha'ika, ia diterima dan dihargai oleh masyarakat setempat, bahkan kemudian dinikahkan dengan seorang puteri Rapa Sipad. Ini yang menjadi titik awal masuknya Islam di Filipina. Bukti lain masuknya Islam di wilayah itu ditemukannya sebuah batu nisan di Badatto, tidak jauh dari Jolo di Pulau Sulu, bernama Miqbal dengan tarikh 1310 M. Penemuan batu nisan inilah yang dijadikan salah satu bukti arkeologis masuk dan berkembangnya Islam di Filipina. (**Saifullah SA, 2008 : 55**).

Sejarah kedatangan Bangsa Spanyol di Filipina tidak terlepas dari kejatuhan konstantinopel tahun 1453. Bangsa Spanyol menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Filipina pada tanggal 16 Maret 1521 di Pulau Samar melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ia menyebut wilayah baru itu dengan "Philippine", sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Philip II yang berkuasa di Spanyol ketika itu. (**Kustigar Nadeak dan Atmadji, 1986 : 166**).

Awal kedatangan Spanyol disambut oleh Raja Awi dan Raja Kolambu, beserta penduduk pulau. Kemudian mereka semua dibaptis oleh Fr. Pedro de Vaiderrroma, pendeta yang ikut dalam rombongan Ferdinand Magellan. Setelah itu Ferdinand Magellan berlayar ke Cebu dimana ia disambut hangat oleh seorang penguasa yaitu Raja Humabon. Pada saat itu, Raja Humabon sedang mengalami masalah dengan salah satu pengikutnya Lapu-Lapu, kepala suku di wilayah Mactan, sebuah pulau kecil di lepas Cebu. Raja Humabon meminta Ferdinand Magellan beserta pasukannya untuk menindak pengikut Lapu-lapu, namun naas ia justru mati terbunuh dalam perang itu.

Pada tahun 1564 raja Philips II mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Miguel Lopez de Legazpi mendarat di Cebu. Menurut (**Saifullah SA, 2008 : 58**) pasukan Legazpi kemudian berhasil menaklukkan Manila yang ketika itu merupakan salah satu Kerajaan Islam. Mulai saat itu, maka penjarahan dan penjajahan atas Filipina berlangsung. Namun usaha Spanyol dalam menaklukkan Filipina bagian Selatan tidak semudah seperti diwilayah Utara. Spanyol mengalami kesulitan untuk menguasai wilayah muslim Moro sebab masyarakat Moro menolak dengan gigih. Menurut **Kustigar Nadeak dan Atmadji (1986 : 168-169)** Spanyol hanya bisa mendirikan mendirikan kedudukan di dua tempat di pulau Mindanao, kedudukan pertama di ujung Semenanjung Zamboanga dan kedudukan kedua berada di Caraga yang terletak di ujung Timur laut Pulau Mindanao. Pilihan itu diambil berfungsi sebagai pos pengawas untuk mengawasi gerakan masyarakat Moro yang menyerang

kedudukan Spanyol di Pulau Luzon. Sebab, rute penyerangan masyarakat Moro adalah melalui ujung Semenanjung Zamboanga dan pulang melalui sisi Timur pulau yaitu dekat dengan Caraga.

Usaha Spanyol menaklukkan wilayah Moro tidak berhasil sampai Amerika Serikat menguasai Filipina. Penjajahan Amerika Serikat atas Filipina dimulai sejak armada Laksamana Dewey berhasil mengalahkan Spanyol dalam perang Spanyol – Amerika di teluk Manila tahun 1898. Akibat kealahannya Spanyol terpaksa menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat dengan ditandai *Treaty of Paris* pada tanggal 10 Desember 1898, yang sekaligus mengakhiri perang Spanyol – Amerika Serikat.

Berbeda dengan Spanyol, pemerintahan Amerika Serikat tidak menunjukkan langsung ”muka” penjajahnya tetapi lebih mengaburkannya dengan misi yang lebih menekankan pendidikan dan pembangunan. Menurut **Caesar Adib Majul (1989 : 15)** memang merupakan kebijakan resmi Amerika Serikat untuk membiarkan kehidupan agama orang-orang Islam dan kebiasaan ritual-ritual Islam. Meskipun demikian, Islam dirasakan sebagai asing dan ganjil sebagian besar pejabat Amerika, sesuatu yang dikhawatirkan dan dipandang rendah. Meskipun kurang menghargai sistem tradisional *datu* para pejabat Amerika tidak pernah berupaya secara nyata untuk menghapuskannya. Mereka menindas *datu-datu* yang keras kepala, tetapi mempertahankan hubungan persahabatan dengan mereka yang telah siap menerima kedaulatan Amerika.

Penjajahan Amerika Serikat atas Filipina ternyata tidak sesuai harapan Amerika, daerah jajahan itu tidak dianggap sebagai *asset* yang berarti dibidang ekonomi. Keuntungan yang berhasil diperoleh dari investasi di jajahan Filipina sangat sedikit. Biaya pemerintahan tidak dapat sepenuhnya ditutupi dari pemasukkan pajak setempat, sementara biaya tersebut diperbesar oleh tambahan untuk biaya pertahanan militer. Singkatnya, Filipina secara ekonomis dapat dipandang sebagai merugikan bagi Amerika Serikat. (**John Bresnan, 1988 : 7 - 8**). Tahun 1934, melalui Tydings McDuffie Act, Amerika Serikat mengizinkan Filipina merdeka pada tahun 1944. Sebuah pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1935 untuk memilih Presiden *Commonwealth of the Philippines*. Pemilihan itu dimenangkan oleh Manuel L. Quezon dan kemudian sebuah pemerintahan Filipino dibentuk dengan dasar konstitusi Amerika Serikat.

Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946, antara tahun 1946-1972, Filipina terus menggunakan sistem dua partai seperti Amerika Serikat. Sebagai presiden pertama pasca kemerdekaan Filipina adalah Manuel Roxas, Manuel Roxas terpilih sebagai presiden dari partai Liberal mengalahkan lawan politiknya yaitu Osmena. Masa diawal-awal kemerdekaan Filipina, peranan Amerika Serikat sangat dominan dalam merekonstruksi kembali Filipina.

Kemerdekaan Filipina tidak memiliki makna yang berarti terhadap masyarakat Moro, mereka tetap mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan marjinalisasi seperti; kemiskinan, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah Moro, bahkan tidak jarang diskriminasi telah

mengarah kepada kekerasan militer. Contohnya insiden Jabidah tahun 1968 yang mempercepat ketegangan konflik Moro.

Berikut latar belakang dan faktor-faktor penyebab timbulnya konflik Moro dengan pemerintah Filipina;

1. Faktor Sejarah

Diantara faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik Muslim Moro adalah faktor sejarah, maksud faktor sejarah ini yaitu dampak dari penjajahan oleh bangsa Spanyol dan Amerika Serikat yang berupaya mengintegrasikan wilayah-wilayah Moro dengan Filipino. Telah diketahui Wilayah Filipina Selatan (Kepulauan Mindanao dan Sulu) sebelum kedatangan penjajah, sudah terlebih dahulu ada agama Islam yang sangat mengakar di wilayah tersebut. Pada saat itu, Muslim Moro telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi dan Masyarakat Moro sudah memiliki sistem hukum dan politik yang diatur berdasarkan Syariat Islam. (**Helmiati, 2008 : 217**).

Muslim Moro seperti yang telah diwakilkan oleh MILF menyatakan bahwa Bangsa Spanyol selama 300 tahun lebih tidak pernah berhasil menundukkan masyarakat Moro menjadi daerah jajahan. Bangsa Spanyol telah menggunakan berbagai cara untuk menundukkan masyarakat Moro. Seperti diterangkan oleh **Syabbudin Mangandaralam (1989 : 21-22)** menyatakan bahwa orang Moro yang beragama Islam di Filipina Selatan, sepanjang sejarahnya belum pernah berhasil ditundukkan oleh Spanyol dari sudut agama dan kebudayaan. Mereka tetap bertahan dari pengaruh kebudayaan Spanyol dan agama Katholik sampai saat ini. Untuk melawan kekuasaan Spanyol, orang-orang Moro membangun armada-armada perahu dan bertindak sebagai bajak laut yang tangguh.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Sumberdaya di wilayah Filipina Selatan

Sebenarnya bila dicermati lebih lanjut, konflik Muslim Moro dengan penguasa (pemerintah Filipina), dipengaruhi oleh sikap dan tindakan pemerintah terhadap kelompok minoritas. Sikap dan tindakan pemerintah dapat dilihat dari pola-pola kebijakannya. Melihat kasus konflik yang terjadi di Filipina tersebut, latar belakang timbulnya konflik tidak hanya sekedar faktor sejarah saja, melainkan juga sikap dan kebijakan penguasa yang tidak adil terhadap wilayah Muslim Moro.

Dijelaskan oleh **Caesar Adib Majul (1989 : 34)** terkait masalah Moro berdasarkan berbagai laporan komite Senat telah menekankan, bahwa masalah-masalah di Cotabato disebabkan oleh besarnya gelombang kaum penetap dari provinsi-provinsi lain, dan akibat kegagalan pemerintah dalam membantu orang-orang Islam meningkatkan produktivitas mereka. Contohnya, sebuah laporan Senat mengungkapkan bahwa sampai tahun 1971, di daerah-daerah yang terutama terdapat populasi Islam, disana tidak terdapat proyek-proyek irigasi. Laporan ini juga menyebutkan bahwa di daerah-daerah yang orang Islamnya telah menjadi minoritas, tidak ada orang-orang Islam yang dapat dipilih untuk jabatan-jabatan politik.

Disisi lain ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dilihat pada pendapatan per kapita wilayah Muslim. Angka kemiskinan di wilayah muslim sangat tinggi. Berdasarkan data **Heru Susetyo (2009 : 14)** menerangkan bahwa pendapatan perkapita di wilayah muslim adalah Php (Philippina Peso) 3.433 pada tahun 2005.

Tentu sangat kontras bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita di wilayah lainnya, contohnya di 17 region lainnya adalah Php 14.186. bahkan region termiskin kedua di Filipina pendapatan per kapitanya masih dua kali lebih baik daripada wilayah otonomi Muslim (ARMM).

3. Diskriminasi dan Tekanan Terhadap Identitas Sosial Budaya

Menurut **Heru Susetyo (2009 : 15)** bahwa kesulitan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan penyebab permasalahan masyarakat Moro. "Penduduk Muslim sukar mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintah maupun di pertanian umum, hanya karena mereka muslim". tutur Evelyn, Muslimah Moro yang diwawancarai Heru Susetyo. Diskriminasi dalam bidang pekerjaan juga jelaskan oleh Erni Budwanti sejumlah perusahaan dan industri yang dikembangkan oleh pemerintah dan swasta. Misalnya, perusahaan baja nasional menyerap pekerja-pekerja non Muslim dari Luzon dan Visayas. Selain itu menurut **Erni Budiwanti (2003 : 83)** diskriminasi dan tekanan juga terlihat dari perubahan pemakaian tanah-tanah Moro, banyaknya tanah-tanah Moro digunakan untuk pembangunan jaringan infrastruktur yang menghubungkan wilayah Selatan dan Utara Filipina, seperti jalan raya, gedung perkantoran, daerah perdagangan, pembangkit listrik, dan kawasan industri lainnya. Penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat Moro seringkali dilakukan untuk kepentingan pembangunan. Contohnya terjadi penggusuran terhadap dua puluh dua keluarga miskin masyarakat Moro di General Santos untuk meratakan jalan bagi pembangunan konstruksi Departemen Perikanan Filipina.

Sebagai respon masyarakat Moro atas kebijakan pemerintah Filipina yang tidak menguntungkan mereka. Maka masyarakat Moro mendirikan gerakan-gerakan perlawanan untuk menuntut pemisahan dari negara Filipina dan membentuk negara sendiri. Berikut gerakan-gerakan rakyat Moro;

1. MIM (Mindanao Independent Movement)

Gerakan masyarakat Moro pertama kali didirikan di Filipina Selatan khususnya wilayah Mindanao dan Sulu yaitu MIM (*Muslim Independent Movement*) yang kemudian berubah nama menjadi *Mindanao Independent Movement*. Gerakan MIM ini didirikan oleh Datu Udtog Matalam pada tanggal 1 Mei 1968. Tujuan dari berdiri organisasi MIM adalah berjuang untuk mencapai kemerdekaan bagi Mindanao dan Sulu. (**Caesar Adib Majul, 1989 : 43**)

Latar belakang beridirinya Mindanao Independent Movement (MIM) di tahun 1968 tidak terlepas dari peristiwa pembantaian Jabidah pada 18 Maret 1968, pada masa presiden Ferdinand Marcos. Tragedi Jabidah merupakan titik awal lahirnya gerakan kemerdekaan bagi masyarakat Moro, yang kemudian diikuti oleh organisasi *Moro National Liberation Front* (MNLF), dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF)

2. MNLF (Moro National Liberation Front)

Moro National Liberation Front / Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) adalah suatu organisasi perjuangan radikal yang menginginkan kemerdekaan penuh bagi Muslim Moro yang berada di Filipina Selatan. Proses berdirinya MNLF menjadi

organisasi perjuangan Moro tidak terlepas dari berbagai bentuk diskriminasi rakyat Moro terlebih akibat dari Pembantaian Jabidah.

MNLF merekrut para anggotanya dari beberapa kelompok etnis seperti etnis Tausug, Samal dan Yakan. Anggota pertamanya terdiri dari golongan pemuda yang berlatar belakang dari pendidikan sekuler, pemuda tersebut mendapat pelatihan militer di Malaysia. Seperti Nur Misuari, pemimpin MNLF, anak-anak muda ini pada umumnya berlatar belakang pendidikan sekuler, dan beberapa orang diantaranya pernah terlibat dalam gerakan politik mahasiswa beraliran kiri. (**John Greshman dalam Moeflich Hasbullah, 2003 : 241**).

MNLF didirikan, tujuannya adalah untuk menciptakan independensi kampung halaman Muslim Moro. Namun, di bawah tekanan negara-negara Islam, MNLF telah menerima opsi otonomi dalam negara Filipina. Para pemimpin MNLF sekarang ini bekerja dalam pemerintahan wilayah otonom Muslim Mindanao. (**John Greshman dalam Moeflich Hasbullah, 2003 : 241**)

Gerakan MNLF mendapatkan berbagai dukungan dan bantuan baik berbentuk finansial maupun material dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Seperti pemimpin Lybia kolonel Muammar Khadaffy, dan dari organisasi Islam OIC (Organisation of Islamic Conference)/ Organisasi Konferensi Islam (OKI). Menurut **Erni budawanti (2003 : 94)** sejak tahun 1972 OKI sering membicarakan permasalahan Muslim Filipina Selatan, bahkan dijadikan OKI sebagai agenda tahunan dengan Negara-negara anggota. OKI mendesak pemerintah Filipina yang pada waktu itu pada masa pemerintahannya Marcos guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muslim Moro.

Namun, pada tahun 1977 dan 1978 dibalik dukungan itu gerakan MNLF mengalami masa-masa kesulitan. MNLF sebagai induk perjuangan Moro akhirnya terpecah. Moro National Liberation Front (MNLF) dipimpin oleh Nur Misuari dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dipimpin oleh Salamat Hashim.

3. MILF (Moro Islamic Liberation Front)

Lahirnya gerakan Moro Islamic Liberation Front (MILF) tidak terlepas dari konflik intern yang pernah dialami MNLF. Faksi Salamat Hashim melihat perjuangan MNLF dirasakan kurang memenuhi aspirasi masyarakat Moro di Filipina Selatan, sebab MNLF telah mengadakan negosiasi damai dengan pemerintah Filipina, hal ini dirasa oleh faksi Salamat Hashim telah keluar dari tujuan utama dibentuknya MNLF yaitu, untuk mendirikan negara terpisah dari Filipina.

Konsep-konsep jihad yang pada awalnya dibentuk oleh Salamat Hashim dengan Prof. Nur Misuari tentang bentuk sistem pemerintahan Islam, akan tetapi dalam perjalanan gerakan MNLF mengalami kemunduran dan melemahnya konsep-konsep jihad yang sudah dibentuk. Karena banyak tawaran yang diterima oleh Prof. Nur Misuari dari pemerintah Filipina, walaupun dari segi *zhahir* tawaran tersebut menguntungkan orang-orang masyarakat Moro. Maka dari itu, Salamat Hashim memutuskan untuk memisahkan diri dari gerakan MNLF dan membentuk gerakan Islam yang dinamakan MILF (Moro Islamic Liberation Front). (**Abu Ibrahim Muhammad Daud, 2008 : 112**).

Moro Islamic Liberation Front atau Front Pembebasan Islam Moro (MILF) adalah gerakan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Moro yang bertujuan untuk membebaskan Islam, gerakan tersebut sangat berpengaruh di bagian Filipina Selatan terutama di kawasan Mindanao dan pulau-pulau lainnya. (**Abu Ibrahim Muhammad Daud, 2008 : 69**).

Moro Islamic Liberation Front (MILF) secara resmi didirikan tahun 1984, berawal dari sebuah kelompok yang dipimpin oleh anggota Komite Sentral yaitu Salamat Hashim yang keluar dari MNLF tak lama setelah gagalnya Perjanjian Tripoli tahun 1977. MILF mulanya disebut MNLF-New, kemudian tahun 1984 secara formal berganti menjadi MILF. Menurut **John Greshman (dalam Moeflich Hasbullah, 2003 : 241-142)** menerangkan bahwa MILF lebih menekankan pada persoalan-persoalan Islam, dan kebanyakan pemimpinnya adalah para sarjana Islam yang berlatar belakang agama dan aristokrat tradisional. MILF mengakui memiliki 120.000 para pejuang bersenjata dan tak bersenjata serta sejumlah besar simpatisan. Kebanyakan anggotanya berasal dari Manguindanao dan kelompok etnis Iranun, serta sebagian kecil dari etnis maranao.

Untuk mengatasi konflik Moro pemerintah Filipina mengadakan perjanjian dengan gerakan pembebasan muslim Moro dalam hal ini diwakili oleh MNLF (Moro National Liberation Front).

1. Tripoli Agreement 1976

Sebelumnya pemerintah tidak ada kompromi dengan gerakan rakyat Moro, namun, atas desakan OKI akhirnya pemerintah Filipina mau mengadakan perundingan guna menyelesaikan konflik Moro. Atas bantuan Lybia, pejabat pemerintahan Filipina dan para pemimpin MNLF melakukan negoisasi tentang kependudukan dikenal dengan nama Tripoli Agreement (Perjanjian Tripoli 1976).

Kesepakatan Perjanjian Tripoli menurut John Gershman (dalam Moeflich Hasbullah, 2003 : 239) selain termasuk gencatan senjata juga berisi pembentukan pemerintahan otonomi di Filipina Selatan yang mencakup 13 (tiga belas) propinsi, yaitu *Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato utara, Manguindanao, Sultan Kudarat, Lanao Norte, Lanao Sur, Davao Sur, Cotabato selatan, dan Palawan*.

2. Jeddah Accord

Perjanjian Jeddah Accord dimulai dengan kejatuhan rezim Marcos tahun 1985. Saat itu Presiden Corazon Aquino yang menggantikan rezim Marcos melakukan gencatan senjata dengan MNLF. Pada Januari 1987, MNLF dan pemerintah menandatangani perundingan Jeddah Accord di Jeddah Arab Saudi.

Hasil kesepakatan ini menyatakan kedua belah pihak menyetujui proposal yang menjamin pelaksanaan otonomi penuh di Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Palawan serta menyetujui gencatan senjata. Aquino kemudian membentuk komisi konstitusi untuk membuat undang-undang yang menjamin pelaksanaan otonomi bagi Muslim Mindanao melalui referendum.

3. Peace Agreement 1996

Peace Agreement merupakan perjanjian lanjutan sebelumnya. Perjanjian Peace Agreement 1996 ditandatangani antara pemerintahan Fidel Ramos dan Pemimpin MNLF Nur Misuari. Tidak seperti Aquino yang pernah menolak peran OIC dalam penyelesaian konflik Moro. Ramos menyambut baik peran OIC sebagai mediator antara keduanya. Hal ini didasarkan pertimbangan Ramos bahwa OIC menolak pemisahan Moro dari Filipina, dan mendorong MNLF agar menerima otonomi.

Menurut **John Gershman (dalam Moeflich Hasbullah, 2003 : 239-240)**, Perjanjian Damai tahun 1996 menawarkan dua tahapan implementasi. Tahap pertama, periode transisi pada tiga tahun pertama, dan diikuti oleh Pemerintahan Otonomi Regional Baru yang akan dilaksanakan mulai dari September 1999. Rencana akhir otonomi wilayah plebisit yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2001. Selain itu juga pemilu untuk memilih gubernur, wakil gubernur dan perwakilan regional ARMM.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian skripsi yang berjudul *"Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 – 1996 (Suatu Kajian Historis)"* adalah sebagai berikut.

1. Konflik Moro mempunyai latar belakang yang sangat panjang secara historis, dimana orang-orang yang mendiami kepulauan Sulu dan Mindanao kemudian kedatangan agama Islam, agama Islam telah membentuk identitas dan kebudayaan bagi orang-orang yang mendiami wilayah itu. Ketika kota Konstantinopel jatuh ketangan Muslim, setelah itu orang-orang Eropa mengadakan pelayaran ke benua Timur dimana Bangsa Spanyol berhasil menemukan kepulauan Filipina, hal ini menjadi awal permusuhan yang berujung pada konflik Moro, Filipina bagian Selatan yang saat itu telah mewarisi kebudayaan Islam akhirnya menolak penjajahan oleh bangsa Spanyol, konflik ini terkenal dengan perang berpuluh-puluh tahun yang oleh orang Barat dinamakan *The Moro Wars*. Konflik Moro semakin meluas tanpa kapan akan berakhir hingga datangnya Amerika Serikat, terlebih ketika Amerika Serikat mendapatkan wilayah Filipina dengan harga 20 juta dolar Mexico. Pencaplokan sepihak inilah yang menyebabkan konflik Moro terus berlangsung dan berlanjut, hingga Filipina mendapatkan kemerdekaan penuh. Latar belakang timbulnya konflik Moro ternyata tidak hanya disebabkan faktor sejarah, melainkan faktor diskriminasi dan kemiskinan atas orang-orang Moro dan inilah tampaknya yang menjadi faktor krusial timbulnya konflik Moro hingga berlangsung saat ini. Berbagai diskriminasi seperti pembunuhan, pengusiran dan sulitnya mendapat lapangan pekerjaan menjadi faktor utama timbulnya konflik Moro.
2. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner berupa konsep konflik dari sosiologi penulis bisa menyimpulkan bahwa konflik Moro ditahun 1968 dipicu

atas klaim dari orang-orang Muslim Moro yang tinggal di Filipina Selatan terhadap perlakuan diskriminatif secara sosial, politik dan ekonomi dari orang-orang pemerintahan terhadap mereka. Dengan memperoleh berbagai tindakan diskriminasi sekelompok terpelajar Muslim Moro mendirikan usaha untuk melawan tindakan diskriminasi dan memperjuangkan kepentingan orang Muslim Moro. Tercatat seorang pemimpin tradisional Muslim yaitu Udtog Matalam mendirikan organisasi untuk pertama kali yang memperjuangkan kepentingan orang Moro, namun tampaknya organisasi ini masih bersifat kedaerahaan terbukti serangan yang ditunjukkan masih bersifat sporadis guna melindungi kelompok muslim tertentu.

Lahirnya organisasi yang memperjuangkan kepentingan Muslim Moro yang terkenal adalah MNLF, organisasi yang dipimpin Nur Misuari ini sukses mendapatkan dukungan Dunia Internasional termasuk OKI. Muammar Khadafi saat itu yang memimpin Libya merupakan donatur utama pendukung gerakan MNLF, atas bantuan finansial yang tanpa batas dan bantuan persenjataan MNLF mampu menduduki instansi pemerintah tertentu. Bahkan tidak jarang dalam beberapa pertempuran pasukan pemerintah Filipina harus mengakui ketangguhan strategi peperangan tentara MNLF.

3. Proses penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak yang bertikai adalah dengan mengadakan beberapa pembicaraan yang diprakarsai oleh negara-negara Islam dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), pemerintah Filipina serta perwakilan dari organisasi politik yang mewakili kedua belah pihak yang bertikai dan kemudian pembicaraan ini melahirkan perjanjian atau kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak demi terciptanya kedamaian di Filipina Selatan. Beberapa kesepakatan yang lahir untuk menyelesaikan konflik ini diantaranya; *Tripoli Agreement* yang dilaksanakan pada bulan Desember 1976 di Tripoli, Libya, *Jeddah Accord* yang ditandatangani pada bulan Januari 1987 oleh Presiden Aquino dan Nur Misuari pemimpin MNLF di Jeddah, Arab Saudi, dan *Peace Agreement* yang ditandatangani oleh Presiden Fidel Ramos dan pihak MNLF, isi perjanjian ini menerima otonomi khusus atas wilayah Muslim di Filipina Selatan (ARMM) dan juga pemilihan Gubernur, wakil Gubernur dan perwakilan regional ARMM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik,. Dkk. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ed. 6 Dinamika Masa Kini*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta
- Bresnan, John. 1988. *Krisis Filipina: Zaman Marcos dan Keruntuhannya*. Jakarta: PT. Gramedia

- Budiwanti, Erni. 2003. *Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina : Gerakan Separatis Moro*. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI)
- . 2003 . *Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai*. PSDR-LIPI.
- Daud, Abu Ibrahim Muhammad. 2008. *The Secret of Jihad Moro (Fakta-fakta Perlawanan Kaum Tertindas Muslim Moro)*. Bandung: Islamika
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta. Penerbit UI-Press
- Hasbullah, Moeflich (editor). 2003. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Penerbit Fokus Media
- Helmiati. 2008. *Dinamika Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: Penerbit Suska Press
- Majul, Cesar Adib. 1989. *Dinamika Muslim Filipina*. Jakarta. LP3ES.
- Mangandaralam, Syahbuddin. 1988. *Mengenal Dari Dekat Filipina Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*. Bandung: Penerbit Remadja Karya CV.
- Nadeak, Kustigar & Atmadji, 1986. *Revolusi Damai Rekaman Kemelut di Filipina*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta : PT Inti Idayu Press
- Susetyo, Heru. 2009. *The Journal of a Muslim Traveler, Sebuah Jurnal Melintasi Asia, Amerika, Eropa, dan Australia*. Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Safullah SA. 2008. *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 3, No. 1. *Umat Islam di Filipina Selatan: Sejarah, Perjuangan dan Rekonsiliasi*.
- Sihbudi, Riza (Editor). 2000. *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya*. Seri Penelitian PPW-LIPI No. 6